



LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
Sekretariat Kabinet

TAHUN 2017

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2018

PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Polhukam) Sekretariat Kabinet Tahun 2017 telah disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Deputi Bidang Polhukam dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKj melaporkan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2017, dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Secara umum capaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam tahun 2017 yang tercermin dalam indikator kinerja sudah baik dan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat terwujud dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Polhukam. Diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Deputi Bidang Polhukam di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2018

Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Fadlansyah Lubis



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2017 memfokuskan pada capaian kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara utuh yang tercakup dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran Strategis Deputi Bidang Polhukam, yaitu: “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja “rekomendasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet” secara keseluruhan mencapai **96,75% (744 rekomendasi disetujui Sekretaris Kabinet)** dari 769 rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet) sehingga masuk kategori **Sangat Baik**. Realisasi anggaran Deputi Bidang Polhukam sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai sebesar **Rp.3.791.021.231,-** atau **99,18%** dari pagu anggaran setelah penghematan (*self blocking*) sebesar Rp.3.822.328.000,-.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Deputi Bidang Polhukam telah merealisasikan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam revisi Perjanjian Kinerja tahun 2017 dan penajaman IKU dipastikan dapat meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Polhukam di tahun 2017.



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet	1
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet	2
2. Struktur Organisasi	3
C. Aspek Strategis (<i>strategic issued</i>)	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Gambaran Umum	11
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017	11
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017	15
BAB III CAPAIAN KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Tahun 2016	17
B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	25
C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
BAB IV PENUTUP	32



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Komposisi SDM Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017	4
Tabel 2.1 Sasaran, Program dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017	12
Tabel 2.2 Target Anggaran dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017 (Sebelum Kebijakan Penghematan)	12
Tabel 2.3 Target Anggaran dan Kegiatan Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017 (Setelah Kebijakan Penghematan)	12
Tabel 2.4 Target dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017	14
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017	15
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	17
Tabel 3.2 Capaian Rekomendasi (Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017)	19
Tabel 3.3 Capaian Indikator Sasaran (Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017)	19
Tabel 3.4 Ikhtisar Capaian Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017	22
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Deputi Bidang Polhukam Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017	28
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2017 Deputi Bidang Polhukam	30
Tabel 3.7 Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017	31



BAB
Satu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka membangun birokrasi yang profesional dan bersih melayani, Pemerintah harus berpijak pada *Good Governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti *efisiensi*, *keadilan* dan *daya tanggap* menjadi nilai yang penting. Nilai-nilai lainnya seperti *transparansi*, *penegakan hukum* dan *akuntabilitas publik* juga merupakan nilai-nilai esensial yang berpengaruh pada kinerja pemerintahan yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) sebagai bagian dari Pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2017 sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut.

B. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Polhukam)

Deputi Bidang Polhukam dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan dengan lebih rinci lagi tugas dan fungsinya serta organisasi di bawahnya melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.



1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet

KEDUDUKAN

Deputi Bidang Polhukam merupakan salah satu dari 6 (enam) Deputi dilingkungan Sekretariat Kabinet yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, Deputi Bidang Polhukam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

TUGAS DAN FUNGSI

Deputi Bidang Polhukam mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Polhukam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan



- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Deputi Bidang Polhukam didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi yakni:

- a. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
- c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika.

Deputi Bidang Polhukam sampai dengan akhir Desember 2017 memiliki jumlah SDM sebanyak 55 orang yang terdiri dari 40 orang pejabat struktural (eselon I, II, III, dan IV), 13 orang analis (yakni analis bidang hukum dan analis bidang polhukam), dan 2 orang pengolah data. Selain itu Deputi Bidang Polhukam juga dibantu pegawai tidak tetap berjumlah 6 orang.

Dari 55 orang pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam, saat ini yang sedang mengikuti studi S2 (program master) ada 2 orang dan persiapan keberangkatan dengan kursus bahasa Inggris sebanyak 1 orang, sehingga total pejabat dan pegawai yang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya hanya sebanyak 52 orang saja.

Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Deputi Bidang Polhukam per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

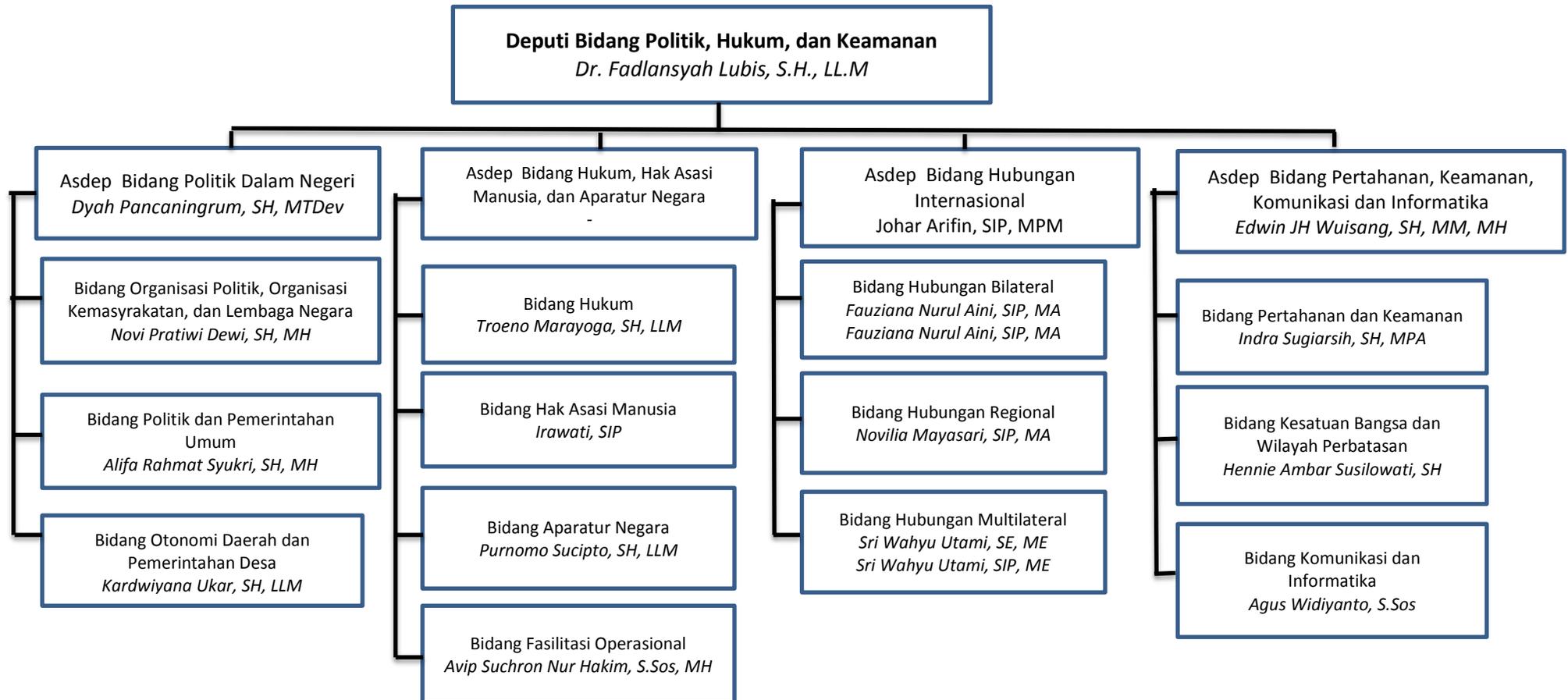


Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat					Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	D 3	S M A		L	P	
IV/d	1	Deputi	1	1	-	-	-	-	1	1		1
IV/c	3	Asisten Deputi	3	-	3	-	-	-	3	2	1	3
IV/b	7	Kepala Bidang	13	-	5	2	-	-	7	4	3	13
IV/a	4			-	4	-	-	-	4	2	2	
III/d	2			-	1	1	-	-	2	-	2	
III/d	9	Kepala Subbidang	23	-	7	2	-	-	9	6	3	23
III/c	12			-	9	3	-	-	12	6	6	
III/b	2			-	2	-	-	-	2	-	2	
III/a	13	Analisis	13	-	1	12	-	-	13	4	9	13
II/d	2	Pengolah Data	2	-	-	-	2	-	2	1	1	2
Jml	55		55	1	32	20	2	-	55	26	29	55

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Deputi Bidang Polhukam sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

ORGANISASI DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET



C. Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dengan tugasnya memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputi Bidang Polhukam dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Melalui tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Polhukam merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral yang dituntut dapat memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang politik, hukum, dan keamanan secara profesional dan berkualitas tanpa ada intervensi dari manapun.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan, Deputi Bidang Polhukam berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*, terutama kebijakan dan program di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diarahkan dan menjadi perhatian prioritas Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputi Bidang Polhukam terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Deputi Bidang Polhukam juga bertugas menangani isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang politik dalam negeri, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, hubungan internasional, pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Selain itu Deputi Bidang Polhukam juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif



keputusan yang akan diambil Presiden. Serta memastikan bahwa arahan Presiden yang disampaikan dalam sidang kabinet maupun rapat terbatas serta pertemuan yang dihadiri Presiden telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/instansi terkait baik pusat maupun daerah.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Deputi Bidang Polhukam memiliki aspek-aspek strategis lainnya dalam yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dengan mengikut sertakan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Meskipun secara kuantitas belum memenuhi kebutuhan standar jumlah sumber daya manusia bagi suatu organisasi setingkat eselon I, tetapi dalam segi latar belakang pendidikan sebanyak 58,18% berlatar belakang S2 bahkan 2 orang lagi sedang menjalani pendidikan S2 di luar negeri.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Deputi Bidang Polhukam. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Penggunaan anggaran dibuat seefisien dan seefektif mungkin, dengan anggaran yang ada diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang menjadi perhatian/prioritas Presiden yakni monev arahan Presiden dan keikutsertaan dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan di K/L terkait.



3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam serta memberi masukan untuk membangun aplikasi berbasis teknologi informasi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Deputi Bidang Polhukam masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputi Bidang Polhukam untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Deputi Bidang Polhukam terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

a. **Belum meratanya kapasitas dan kompetensi SDM yang handal di bidangnya**

Meningkatnya peran Deputi Bidang Polhukam dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, kondisi saat ini kapasitas dan kompetensi SDM belum merata pada masing-masing bidang. Sebagai gambaran SDM/aparatur yang



dibutuhkan oleh Deputi Bidang Polhukam saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, SDM yang ada belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut (baik secara kuantitatif maupun kualitatif), meskipun dari sisi pendidikan sudah cukup memadai, tetapi perlu ditingkatkan kompetensi dan kapasitasnya khususnya bagi para analis baik analis hukum maupun analis polhukam.

b. Masih lemahnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Polhukam harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

c. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Deputi Bidang Polhukam juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang memadai dan berbasis teknologi informasi.

LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Deputi Bidang Polhukam diantaranya meliputi:



a. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Deputi Bidang Polhukam yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam berdasarkan *talent mapping*.

b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparaturnya pemerintah.

c. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet. Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet perlu segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang Polhukam pada khususnya dan Sekretariat Kabinet pada umumnya. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasarana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.



B A B
Dua

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Pada awal tahun 2017, Deputi Bidang Polhukam telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet, Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2016 rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

SASARAN: TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Pemilihan sasaran tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam yakni berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi kebijakan yang berkualitas bidang politik, hukum, dan keamanan.

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai melalui **3 (tiga) indikator kinerja** yang mencakup pencapaian seluruh tugas dan fungsi Deputi Bidang



Polhukam. Ketiga indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **4 (empat) kegiatan**. Empat kegiatan dimaksud juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masing-masing Asisten Deputi yang ada di lingkungan Deputi Bidang Polhukam.

Adapun ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan Deputi Bidang Polhukam pada tahun 2017 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Sasaran, Program dan Kegiatan
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri 2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara 3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional 4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputi Bidang Polhukam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Anggaran dan Kegiatan
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017
(Sebelum Kebijakan Penghematan)

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Politik Dalam Negeri (Kode Kegiatan: 5015)	Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus jutarupiah)
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Kode Kegiatan: 5016)	Rp.993.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional (Kode Kegiatan: 5018)	Rp..1.093.000.000,- (satu juta sembilan puluh tiga juta rupiah)



KEGIATAN	ANGGARAN
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika (Kode Kegiatan: 5017)	Rp.940.000.000 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah)
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG POLHUKAMTAHUN 2017	Rp.4.126.000.000,- (empat milyar seatus dua puluh enam juta rupiah)

Namun, pada bulan Juni 2017 dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, anggaran kegiatan di seluruh kementerian/lembaga harus dihemat atau *self blocking*, sehingga sampai akhir tahun 2017, anggaran yang digunakan di untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 2.3
Target Anggaran dan Kegiatan
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017
(Setelah Kebijakan Penghematan)

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Politik Dalam Negeri (Kode Kegiatan: 5015)	Rp.1.019.040.000,- (satu milyar eembilan belas juta empat puluh riburupiah)
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Kode Kegiatan: 5016)	Rp.919.916.000,- (Sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional (Kode Kegiatan: 5018)	Rp.1.012.556.000,- (satu milyar dua belas juta lima ratus lima puulh enam ribu rupiah)
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika (Kode Kegiatan: 5017)	Rp.870.816.000 (delapan ratus tujuh puluh juta delaoan ratus enam belas ribu rupiah)
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG POLHUKAM TAHUN 2016	Rp.3.822.328.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)



Kebijakan *self blocking* yang dikeluarkan pemerintah menyebabkan pagu anggaran yang digunakan oleh Kedeputan bidang Polhukam berkurang sebesar Rp.305.572.000,- atau sekitar 7,36%.

Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Target dan Indikator Kinerja
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel diatas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jbaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2017. Pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017, Deputi Bidang Polhukam tetap menargetkan kinerja sebesar **100%** dengan pertimbangan bahwa semua rekomendasi di bidang polhukam harus berkualitas dalam arti disetujui oleh Sekretaris Kabinet.



C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Polhukam pada tahun 2017 pada dokumen Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017, maka IKU yang digunakan berubah menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	ALASAN
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">a. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinetb. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinetc. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet



BAB
Tiga

CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) Tahun 2017 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Polhukam yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja maupun peningkatan kinerja Deputi Bidang Polhukam secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Deputi Bidang Polhukam.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Deputi Bidang Polhukam telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Deputi Bidang Polhukam. Untuk mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.



Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Deputi Bidang Polhukam terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini hanya melaporkan hal-hal yang strategis saja, sehingga hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon II dibawahnya.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

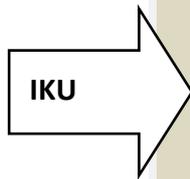
No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	≥ 100	Memuaskan
2	85 % - 100 %	Sangat Baik
3	70 % - <85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Cukup
5	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2017. Secara umum Deputi Bidang Polhukam tidak mengalami perubahan nomenklatur, sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam struktur tersebut, nomenklatur unit eselon II menggambarkan fugas dan fungsi yang secara garis besarnya menyiapkan rekomendasi yang berkualitas di bidang Polhukam dalam bentuk rekomendasi kebijakan, rekomendasi izin prakarsa, dan rekomendasi materi sidang Kabinet yang telah ditetapkan menjadi Sasaran Strategis Deputi Polhukam, yakni sebagai berikut:





- A. PERSENTASE REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET
- B. PERSENTASE REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PUU DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET
- C. PERSENTASE REKOMENDASI TERKAIT MATERI SIDANG KABINET, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, Deputi Bidang Polhukam telah melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut.

Capaian Kinerja Deputi Bidang Polhukam

Secara garis besar Deputi Polhukam telah menyelesaikan penugasan yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet terkait dengan penyampaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Polhukam berupa rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang Polhukam.

Secara garis besar **capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam** dalam mencapai Sasaran Strategis di tahun 2017 ini adalah sebesar **96,75%** atau tergolong dalam kategori **sangat baik** (karena capaian sasaran sebesar 96,75% berada pada rentang 85% - 100%). Perbandingan antara output dan outcome adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Rekomendasi
(Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017)

Rekomendasi	Output	Outcome	% CAPAIAN
1. Rekomendasi Kebijakan (memorandum dan surat Sekretaris Kabinet)	573	557	97,21%
2. Rekomendasi Izin Prakarsa dan Substansi RPUU serta Rancangan yang ditetapkan Presiden	67	65	97,02%
3. Rekomendasi Materi Sidang, Butir Wicara, dan Arahan Presiden	129	122	94,57%
Total	769	744	96,75%

Uraian mengenai capaian indikator sasaran, yaitu capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam dari mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	97,21%	97,21%
2.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	97,02%	97,02%
3.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	94,57%	94,57%



Indikator Kinerja 1

Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Kualitas rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stake holders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator pertama mencapai **97,21% (Sangat Baik)** dari keseluruhan jumlah rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang kemudian disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Hal tersebut terlihat bahwa dari **573 rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, sebanyak **557 rekomendasi disetujui** oleh Sekretaris Kabinet.

Rekomendasi yang disetujui disini telah memenuhi kriteria:

1. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan atau bahan alternatif yang dapat dipakai Presiden untuk memutuskan suatu kebijakan atau hanya untuk dibaca/diketahui Presiden sebagai referensi dan/atau *second opinion*.
2. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Instansi terkait untuk diketahui sebagai referensi atau ditindaklanjuti sesuai kewenangannya (baik berupa surat maupun memorandum Sekretaris Kabinet).
3. Rekomendasi yang disiapkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam mengambil suatu kebijakan/keputusan atau dijadikan sebagai bahan referensi dalam pertemuan dengan Presiden atau instansi terkait atau audiensi dari utusan Negara sahabat, organisasi kemasyarakatan atau publik lainnya.



Di tahun 2017 ada sebanyak 16 rekomendasi bidang Polhukam yang tidak disetujui oleh Sekretaris Kabinet, terhadap ke-enambelas rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, namun turun tanpa ada catatan/disposisi Sekretaris Kabinet.

Indikator Kinerja 2

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan RUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Dalam tahun 2017, Kedeputan Bidang Polhukam telah menghasilkan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi atas suatu rancangan RUU bidang Polhukam yang **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet sebanyak **65 (enam puluh lima) rekomendasi** atau **97,02% (sangat baik)** dari **67 (enam puluh tujuh) rekomendasi** yang diajukan atau dengan kata lain tahun 2017 ada 2 (dua) rekomendasi yang tidak disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Rekomendasi persetujuan prakarsa/substansi ini dapat berupa surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Instansi yang berisi persetujuan kepada Menteri/Pimpinan untuk melanjutkan penyusunan suatu RUU atau memorandum Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara.

Terkait dengan substansi RUU dapat berupa memorandum laporan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet berupa masukan yang diberikan dalam suatu rapat pembahasan RUU yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi terkait maupun yang diselenggarakan di Sekretariat Kabinet. Selain itu dapat juga berupa naskah surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang berisi catatan atas permohonan penyusunan suatu RUU agar dikaji kembali atau dirumuskan ulang agar tidak terjadi tumpang tindih, multi tafsir atau bertentangan dengan RUU lainnya.

Indikator Kinerja 3

Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet



Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Polhukam dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tugas dan fungsi ini beririsan dengan tugas dan fungsi Deputi Dukungan Kerja Kabinet (sebelumnya Deputi Persidangan) yang tetap menyiapkan materi sidang yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga serta mengoordinasikan bahan yang diperoleh dari Deputi Substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator kelima ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam tahun 2017, Deputi Bidang Polhukam telah menyiapkan sebanyak **129 (seratus dua puluh sembilan)** rekomendasi, dimana **122 (seratus dua puluh dua) rekomendasi disetujui** oleh Sekretaris Kabinet guna disampaikan sebagai materi/bahan atau referensi bagi Presiden atau Sekretaris Kabinet sendiri. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai **94,57%** dengan kategori **sangat baik** atau dengan kata lain ada sekitar 7 (tujuh) rekomendasi yang diajukan tidak disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Dari penjelasan di atas, maka realisasi kinerja Deputi Bidang Polhukam selama tahun 2017 adalah perbandingan keseluruhan rekomendasi yang disampaikan (*output*) sebanyak 769 dengan capaian rekomendasi yang disetujui (*outcome*) sebanyak 744 sehingga persentase capaian sebesar **96,75%**. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Deputi Bidang Polhukam selama tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Ikhtisar Capaian Sasaran Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	%CAPAIAN	OUTPUT	OUTCOME
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	769 Rek	769 Rek	769 Rek	744 Rek	96,75%	100% (769 Rek)	96,75% (744 Rek)

Rek : Rekomendasi

Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Deputi Bidang Polhukam memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait terkait suatu kebijakan dan program pemerintah;
- b. Munculnya isu-isu penting bidang politik, hukum, dan keamanan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi; dan
- c. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Polhukam pada Tahun 2017 dapat dikategorikan sangat baik, namun



dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait, mengenai penyiapan bahan sidang kabinet atau rapat terbatas, sehingga memerlukan inovasi tersendiri bagi pegawai di lingkungan Kedeputan Bidang Polhukam untuk mendapatkan bahan tersebut, sehingga cenderung bahan yang disampaikan dapat dijadikan sebagai *second opinion* bagi Presiden dalam memberikan arahan dalam sidang atau rapat tersebut.
- b. Sistem aplikasi berbasis IT yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyusun rekomendasi perlu dibangun dan terintegrasi sehingga lebih memudahkan dan mempercepat penyelesaian tugas, mengingat waktu penyelesaian sangat menjadi prioritas Presiden.
- c. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas; dan
- d. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Peningkatan kualitas tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, penyusunan rekomendasi dan analisis, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang yang diperlukan oleh Deputi Bidang Polhukam, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja.



- d. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait menjalin *networking* seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan perundangan lainnya, Deputi Bidang Polhukam menyarankan perlunya dilakukan *review* atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja dilakukan untuk menganalisis celah kinerja (*performance gap*) sasaran strategis yang ditargetkan dengan capaiannya guna perbaikan.

B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Deputi Bidang Polhukammenjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi

sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang politik, hukum, dan keamanan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholder* terkait.



C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp.4.126.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh enam juta rupiah)** yang terbagi kedalam 4 (empat) kegiatan besar yang dilakukan oleh keempat unit eselon II di bawahnya.

Realisasi anggaran sampai akhir tahun 2017 untuk pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam apabila tidak memperhitungkan kebijakan penghematan anggaran (*self blocking*) adalah sebesar **Rp.3.791.021.231,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah)** atau sebesar **91,88%**. Angka ini sudah baik penyerapannya, mengingat penyerapan minimal yang dapat dicapai oleh setiap Kementerian/Lembaga adalah sebesar **90,00%**.

Namun, apabila diperhitungkan dengan adanya *self blocking*, maka anggaran tahun 2017 yang telah digunakan oleh Kedepuitan Bidang Polhukam sampai akhir tahun 2017 yang sebesar **Rp.3.791.021.231,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah)** atau sebesar **99,18%**, hal tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Bahkan apabila dilihat serapan anggaran per unit eselon II, maka dari 4 Keasdepan yang ada, yang persentase serapan sampai dengan 99% ada 2 Keasdepan sedangkan yang persentaserapannya mencapai 98% ada 2 Keasdepan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table di bawah ini.



Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis (Pagu Awal)
Deputi Bidang Polhukam
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	97,21	Rp.4.126.000.000,- (PaguAwal)	Rp.3.791.021.231,-	91,88%
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	97,02	Rp.3.822.328.000,- (PaguRevisi)	Rp.3.791.021.231,-	99,18%
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	94,57			

Selanjutnya akan disampaikan disini terkait penggunaan anggaran di Deputi Bidang Polhukam selama kurun waktu tahun 2017. Selama tahun 2017 Deputi Bidang Polhukam telah mempergunakan anggaran sebesar **Rp.3.791.021.231,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah)** atau sebesar **91,88%** dari keseluruhan target anggaran sebelum APBN P 2017 (*self blocking*) yaitu sebesar Rp.4.126.000.000,-. Tetapi jika membandingkan dengan anggaran yang tersedia setelah adanya kebijakan *self blocking*, dimana anggaran Kedeputusan Bidang Polhukam terkena *self blocking* sebesar Rp 303.572.000,- atau 7,36% sehingga yang dapat digunakan sampai akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp 3.822.328.000,- maka **persentase realisasinya** sebesar **99,18%**

Realisasi ini sangat baik jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran. Banyak kegiatan baru arahan Sekretaris Kabinet terkait dengan monitoring dan evaluasi (monev) arahan Presiden yang disampaikan kepada Kementerian/ Lembaga dapat dilaksanakan dengan baik meskipun belum seluruhnya dapat dilaksanakan. Beberapa kegiatan monev arahan Presiden yang dapat dilaksanakan adalah monev terkait: pelaksanaan Pilkada serentak 2017, perda bermasalah dan implementasi pasca Putusan MK, moratorium pembangunan sarana prasarana, monev terkait pelayanan publik (seperti pengurusan imigrasi, e-KTP, KK), monev terkait kebijakan hukuman mati, monev perkembangan media massa, monev kerjasama daerah dengan LN (*sister city*) dll, serta ikut serta dalam delegasi RI bersama K/L terkait guna menghadiri konferensi internasional.

Menghadapi kebijakan pemerintah mengenai penghematan anggaran di tahun 2017, Deputi Bidang Polhukam melakukan penyesuaian diri dengan lebih memfokuskan diri pada tugas-tugas utama yang langsung diinstruksikan oleh Sekretaris Kabinet yang sebagian besar hanya menggunakan anggaran yang tidak besar. Oleh karena itu, sebagian besar unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Polhukam segera melaksanakan beberapa kegiatan yang sempat tertunda pelaksanaannya khususnya untuk bidang yang tidak mengalami perubahan signifikan dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebelumnya.



Untuk lebih jelasnya, berikut tabel realisasi anggaran secara keseluruhan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam sepanjang tahun 2017 (Periode Januari – Desember 2017 sesuai revisi anggaran (*self blocking*) tahun 2017)

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2017
Deputi Bidang Polhukam (Setelah Penghematan)

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	Rp.1.019.040.000,-	Rp.1.018.782.690,-	99,97
		2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp.919.916.000,-	Rp.902.495.639,-	98,10
		3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	Rp.1.012.556.000,-	Rp.1.000.462.103,-	98,80
		4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika	Rp.870.816.000,-	Rp.869.280.799,-	99,82
		TOTAL ANGGARAN DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017	Rp.3.822.328.000,-	Rp.3.791.021,-	99,18

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pasca restrukturisasi dengan sasaran strategis yang baru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017

SASARAN STRATEGIS					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
99,03	Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Output	Rekomendasi	769	744
		Input	Rupiah	3.822.238.000,-	3.791.021.231,-
		Input rata-rata per output	Rupiah	4.964.062,-	5.095.458,-
1. Penghematan dana	=	Rp.31.306.769,- (0,82%)			
2. Efisiensi	=	-			
3. Efektifitas	=	% capaian sasaran < % target			

Bila melihat tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Deputi Bidang Polhukam masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan (penghematan) sebesar Rp 31.306.769,- atau (0,82%) dari pagu anggaran setelah adanya kebijakan penghematan anggaran, hal ini berarti sisa anggaran yang tidak digunakan sangat kecil masih di bawah 1%.

Apabila diperbandingkan dengan rata-rata anggaran yang digunakan untuk menghasilkan target output sebanyak 769 rekomendasi maka anggaran rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan 1 (satu) rekomendasi sebesar Rp 4.964.062,-, namun dalam realisasinya ternyata dengan anggaran yang ada jumlah realisasinya hanya sebanyak 744 rekomendasi sehingga anggaran untuk menghasilkan 1 (satu) rekomendasi rata-rata sebesar Rp 5.095.458,- (ada kelebihan sebesar Rp 131.396,- atau 2,65% lebih besar dari target).

BAB
Empat

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai IKU tersebut oleh Deputi Bidang Polhukam dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Kendala utama tidak terlaksananya semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan adalah adanya kebijakan pemerintah mengenai penghematan APBN P 2017 melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2017 yang menyebabkan beberapa rencana kegiatan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Adapun capaian sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam tahun 2017 berdasarkan indikator dari sisi kecepatan maupun ditindaklanjuti, secara keseluruhan masuk kategori **Sangat Baik yakni mencapai 96,75%** meskipun mengalami penurunan dari capaian tahun 2016 yang sebesar 99,30%. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam untuk mampu mencapai target yang telah direncanakan walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, tantangan dan hambatan yang muncul di tahun 2017.

Dalam kurun waktu satu tahun, Deputi Bidang Polhukam telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **769 rekomendasi** (terdiri dari 573 rekomendasi kebijakan, 67 rekomendasi persetujuan prakarsa/substansi, dan 129 rekomendasi terkait bahan/materi sidang, rapat, acara yang dihadiri Presiden/Wakil Presiden) dimana hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016 yakni sebanyak **717 rekomendasi** (terdiri dari 529 rekomendasi kebijakan, 65 rekomendasi persetujuan prakarsa dan substansi, dan 123 rekomendasi terkait bahan/materi sidang, rapat terbatas, dan butir wicara, serta arahan Presiden), dari **total output sebanyak 769**

rekomen-dasi tersebut, sebanyak **744 rekomendasi berupa outcome yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**. Sehingga **realisasi kinerja Deputi Bidang Polhukam selama tahun 2017** ini adalah perbandingan keseluruhan rekomendasi *output* sebanyak 769 dengan capaian *outcome*-nya sebanyak 744 sehingga menghasilkan angka capaian **96,75% hal ini mengalami penurunan bila dibanding tahun 2016 yakni** keseluruhan rekomendasi *output* sebanyak 717 dengan capaian *outcome*-nya sebanyak 712 sehingga menghasilkan angka capaian **99,30%** (meskipun dari segi jumlah tahun 2017 mengalami peningkatan).

Realisasi anggaran Deputi Bidang Polhukam sampai dengan tahun 2017 tercapai sebesar **Rp.3.791.021.231,-** atau **99,18%** dari pagu anggaran setelah penghematan APBN P 2017 sebesar Rp.3.822.328.000,- atau peringkat pertama penyerapan unit kerja di Sekretariat Kabinet bila dibandingkan tahun 2016 yakni **Rp.2.669.722.152,-** atau **97,08%** dari pagu anggaran setelah penghematan APBN P 2016 sebesar Rp.2.750.000.000,- atau peringkat kedua terbesar penyerapan unit kerja di Sekretariat Kabinet dan kedua terbesar diantara 4 (empat) Kedeputusan Substansi.

Diatas semuanya, Laporan Kinerja Deputi Bidang Polhukam Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Masih belum maksimalnya pencapaian sasaran di tahun 2017 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Deputi Bidang Polhukam yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsisten dan harus berorientasi *outcome* (disetujui oleh Sekretaris Kabinet).

Demikian halnya dengan realisasi kegiatan dan anggaran Deputi Bidang Polhukam akan terus ditingkatkan dan dipertahankan pada tahun yang akan datang dengan didukung oleh perencanaan yang matang dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaannya serta penguatan sumber daya manusia yang memadai.

